

Jupe UNS, Vol 2, No 1, Hal 1 s/d 10
Mei Rezki Dwi Inggawati, *Strategi Optimalisasi Retribusi Daerah Dalam Rangka
Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi pada Dinas Pasar Kabupaten Sleman)*,
Juli, 2013.

**STRATEGI OPTIMALISASI RETRIBUSI DAERAH DALAM RANGKA
MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
(Studi pada Dinas Pasar Kabupaten Sleman)**

Mei Rezki Dwi Inggawati, Ngadiman dan Muhtar*

*Pendidikan Ekonomi-BKK Akuntansi, FKIP Universitas Sebelas Maret

Surakarta, 57126, Indonesia

meyrezky@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk mengkaji dan menganalisis strategi yang dilakukan Dinas Pasar Kabupaten Sleman dalam mengoptimalkan penerimaan retribusi pasar. (2) Untuk mengkaji dan menganalisis hambatan atau kendala apa yang dihadapi oleh Dinas Pasar Kabupaten Sleman dalam mengoptimalkan penerimaan retribusi pasar. (3) Untuk mengkaji dan menganalisis peranan retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dan untuk pengumpulan data digunakan *purposive sampling*. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data, reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa strategi optimalisasi untuk meningkatkan penerimaan retribusi pasar di Dinas Pasar Kabupaten Sleman meliputi lima indikator yaitu memperluas basis penerimaan, memperkuat proses pemungutan, meningkatkan pengawasan, meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan serta meningkatkan kapasitas melalui perencanaan yang lebih baik. Strategi yang dirasakan paling efektif adalah pemberlakuan BKPR yang dilakukan dalam proses meningkatkan pengawasan. Strategi dalam memperkuat proses pemungutan yaitu sosialisasi kepada pedagang dan bimbingan teknis kepada juru pungut dirasa masih kurang efektif. Hambatan yang dihadapi oleh Dinas Pasar Kabupaten Sleman, yaitu: (1) Kurangnya SDM yang tersedia. (2) Rendahnya kesadaran pedagang. (3) Tingkat keramaian pasar. Retribusi pasar belum mampu memberikan kontribusi yang tinggi, baik untuk retribusi daerah maupun Pendapatan Asli Daerah. Hal tersebut terlihat bahwa kontribusi retribusi pasar terhadap retribusi daerah dan Pendapatan Asli Daerah masih sangat kurang yaitu <10%.

Kata Kunci: *strategi, retribusi pasar, PAD*

ABSTRACT

The purpose of this study was: (1) to examine and analyze the strategies undertaken in the Sleman Regency in optimizing acceptance of retribution market. (2) To examine and analyze the barriers or obstacles faced by department of Sleman Regency Market in optimizing market tax revenues. (3) To examine and analyze the role of retribution market toward the Real Revenue Regional.

This research is a qualitative descriptive study and for data collection used *purposive sampling*. Data collection methods was used interviews, observation, and documentation. Data analysis techniques was used in this study is data collection, data reduction, data presentation, and conclusion.

Based on the results of this study can be concluded that the optimization strategy to increase market acceptance of retribution in Sleman Regency Office Market includes five indicators of expanding revenue base, strengthen the collection process, improve supervision, increase administrative efficiency and reduce the cost of collecting and increasing capacity through better planning. The most effective strategy is perceived BKPR implementation is done in the process of improving oversight. Strategies to strengthen the socialization process of voting to traders and technical guidance to the interpreter adoptee are still not effective. Retribution market has not been able to contribute high, both for retribution and local revenue. It is seen that the contribution to the market levies and local revenue is very less i.e. <10%.

Keywords: *strategy, market levies, the real revenue regional*

PENDAHULUAN

Pembangunan Nasional mempunyai tujuan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, merata, materiil, spiritual, melalui peningkatan taraf hidup masyarakat, kecerdasan dan kesejahteraan rakyat. Pembangunan tersebut diharapkan dapat dilaksanakan secara merata bagi seluruh rakyat yaitu sesuai dengan asas keadilan sosial. Pemerintah daerah sebagai fasilitator pembangunan di daerah sudah selayaknya berusaha menghimpun dana dari masyarakat melalui pajak dan retribusi dengan cara yang bijaksana sehingga tidak membebani masyarakat untuk pelaksanaan pembangunan, khususnya pembangunan daerah. Pelaksanaan otonomi daerah terkait sumber keuangan yang berasal dari pendapatan asli daerah lebih penting dibandingkan dengan sumber-sumber di luar pendapatan asli daerah, karena

pendapatan asli daerah dapat dipergunakan sesuai dengan prakarsa dan inisiatif daerah untuk pembangunan daerah, sedangkan bentuk pemberian pemerintah (non PAD) sifatnya lebih terikat (Sutedi, 2008:18).

Dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, setiap daerah diberi keluasaan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri tanpa campur tangan dari pemerintah pusat untuk kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Melalui strategi optimalisasi pajak dan retribusi, diharapkan pemerintah daerah juga akan mampu guna meningkatkan kemampuannya dalam penyelenggaraan urusan otonomi daerah khususnya terkait pendapatan asli daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi (Penjelasan UU No. 33 Tahun 2004).

Menurut Bryson (2001:189), strategi didefinisikan sebagai pola tujuan, kebijakan, program, tindakan, keputusan, atau alokasi sumber daya yang mendefinisikan bagaimana organisasi itu, apa yang dikerjakan organisasi, dan mengapa organisasi melakukannya. Definisi tersebut diperjelas dengan pendapat yang dipaparkan oleh Andrews, sebagaimana dikutip oleh Grant (1999:10) yang menyatakan bahwa strategi merupakan bentuk dari tujuan-tujuan, kebijakan utama, dan rencana untuk mencapai tujuan tersebut, yang dipaparkan sedikikan rupa sehingga dapat menerangkan dalam usaha apa organisasi tersebut bergerak atau seharusnya bergerak, dan apa jenis perusahaan tersebut atau apa macamnya.

Menurut Sutedi (2008:8), tingkat akuntabilitas pengelolaan Pendapatan Asli Daerah daerah dalam struktur APBD masih merupakan elemen yang cukup penting peranannya, baik untuk mendukung

penyelenggaraan pemerintahan maupun pemberian pelayanan publik. Apabila dikaitkan dengan pembiayaan, maka pendapatan daerah masih merupakan alternatif pilihan utama dalam mendukung program dan kegiatan penyelenggaraan dan pelayanan publik. Salah satu cara yang dilakukan untuk meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat adalah dengan cara memperbaiki sarana dan prasarana terkait pengelolaan pasar melalui optimalisasi pungutan retribusi daerah.

Menurut Gibson, Ivanevich, dan Donnelly (1994:701) menyatakan bahwa optimalisasi (*optimization*) adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan yang paling diinginkan diantara kriteria efektivitas atau dengan kata lain upaya untuk memaksimalkan sumber-sumber yang telah dimiliki untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

Menurut Josep Riwu Kaho, retribusi memiliki beberapa ciri. Ciri tersebut terkait dengan kewajiban pembayaran pajak. Beberapa ciri retribusi tersebut (Sutedi, 2008:75), yaitu: 1) retribusi dipungut oleh negara; 2) dalam pemungutan terdapat paksaan secara ekonomis; 3) adanya kontra prestasi yang secara langsung dapat ditunjuk; 4) retribusi dikenakan pada setiap orang/badan yang menggunakan jasa-jasa yang disiapkan negara.

Menurut Rohmat Sumitro dalam Sutedi (2008:74) menyatakan bahwa retribusi daerah adalah pembayaran kepada negara yang dilakukan kepada mereka yang menggunakan jasa-jasa negara, artinya retribusi daerah sebagai pembayaran atas jasa atau karena mendapat pekerjaan usaha atau milik daerah bagi yang berkepentingan, atau jasa yang diberikan oleh daerah baik secara langsung maupun tidak langsung. Melalui pungutan retribusi yang dijalankan secara tertib dan teratur, dapat menunjang bagi pembangunan daerah yang lancar dan berkelanjutan. Jika pembangunan daerah berjalan dengan baik, maka masyarakat pada daerah tersebut akan merasakan dampak yang positif, misal kesejahteraan meningkat.

Pasar tradisional merupakan salah satu tempat perputaran uang yang penting sebagai tempat usaha para pedagang kecil dalam mencari akses pemasaran dan memiliki banyak nilai-nilai strategis baik dari segi ekonomi maupun sosial budaya. Peranan dan fungsi pasar yang sangat penting, membuat keberadaan pasar tradisional tampaknya tidak akan mudah menghilang dari persaingan pasar-pasar *modern*. Melihat pentingnya pasar bagi masyarakat, membuat pemerintah harus terus meningkatkan jasa pelayanan pasar agar masyarakat semakin nyaman untuk menggunakan fasilitas di pasar tradisional.

Hal tersebut dapat dilakukan melalui optimalisasi penerimaan retribusi pasar. Retribusi pasar merupakan salah satu jenis retribusi daerah yang termasuk dalam golongan retribusi jasa umum. Tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar pasal 1, disebutkan bahwa retribusi pelayanan pasar, yang selanjutnya disingkat retribusi, adalah pungutan daerah yang dikenakan atas pelayanan dan penyediaan fasilitas pasar.

Pelaksanaan strategi optimalisasi retribusi daerah yang berjalan baik dan tertib, maka kontribusi yang akan diberikan oleh retribusi daerah yang dalam penelitian ini adalah terkait dengan retribusi pasar terhadap penerimaan pendapatan daerah akan lebih besar. Semakin besar kontribusi yang diberikan oleh retribusi pasar, semakin besar pula penerimaan pendapatan asli daerah. Dengan adanya peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah, secara otomatis akan meningkatkan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Hal tersebut tentunya akan dapat menunjang pembangunan daerah yang lancar dan berkelanjutan yang juga akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah.

Dalam penelitian ini, ada 3 permasalahan yang diteliti yaitu 1) Bagaimanakah strategi yang dilakukan

Dinas Pasar Kabupaten Sleman dalam mengoptimalkan penerimaan retribusi pasar? ; 2) Hambatan atau kendala apa yang dihadapi oleh Dinas Pasar Kabupaten Sleman dalam mengoptimalkan penerimaan retribusi pasar? ; 3) Bagaimana peranan retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)”

Sejalan dengan perumusan masalah tersebut, maka tujuan diadakannya penelitian ini adalah 1) Untuk mengkaji dan menganalisis strategi yang dilakukan Dinas Pasar Kabupaten Sleman dalam mengoptimalkan penerimaan retribusi pasar. 2) Untuk mengkaji dan menganalisis hambatan atau kendala apa yang dihadapi oleh Dinas Pasar Kabupaten Sleman dalam mengoptimalkan penerimaan retribusi pasar. 3) Untuk mengkaji dan menganalisis peranan retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif tipe deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah informan, lokasi dan dokumen dan arsip

Informan dalam penelitian ini adalah: 1) Kepala Dinas Pasar Kabupaten Sleman; 2) Kepala Bidang Pendapatan Dinas Pasar Kabupaten Sleman; 3) Staf Seksi Retribusi Pasar; 4) Pemungut Retribusi; 5) Wajib Retribusi (Pedagang).

Dokumen dan arsip yang digunakan adalah segala bentuk arsip laporan, catatan serta dokumen yang berhubungan dengan retribusi pasar.

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling (sampel bertujuan). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Validitas data menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi metode.

Model analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah model analisis data interaktif. Prosedur penelitian yang dilakukan yaitu: 1) Tahap Persiapan Penelitian; 2) Tahap Pengumpulan Data; 3) Tahap Analisis Data; dan 4) Tahap Penyusunan Laporan Penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Strategi Optimalisasi Retribusi Pasar

Strategi optimalisasi penerimaan retribusi pasar yang dilakukan oleh Dinas Pasar Kabupaten Sleman terkait dengan lima indikator, yaitu:

Indikator memperluas basis penerimaan merupakan strategi yang terkait dengan cara meng-identifikasi atau melakukan pen-dataan terhadap objek-objek retribusi pasar. Langkah awal yang dilakukan oleh Dinas Pasar Kabupaten Sleman yaitu dengan memberlakukan

kewajiban kepada pedagang untuk membuat SIM (Surat Ijin Mendirikan) agar setiap wajib retribusi dapat terdata dengan jelas, pendataan objek-objek retribusi pasar yang baru maupun yang lama (yang belum terdata) untuk kemungkinan-kemungkinan yang terjadi apabila belum ada retribusi pasar yang dipungut, pendataan terhadap potensi-potensi retribusi pasar, serta optimalisasi terhadap Unit Pelaksana Teknis yang dilakukan mulai tahun 2010.

Indikator memperkuat proses pemungutan merupakan strategi optimalisasi penerimaan retribusi pasar dengan cara mengadakan Rapat Evaluasi Pendapatan, pe-ningkatan SDM melalui sosialisasi pedagang dan bimbingan teknik bagi juru pungut serta pembuatan leaflet mengenai peraturan-per-aturan yang berlaku terkait dengan retribusi pasar.

Indikator meningkatkan peng-awasan merupakan suatu strategi untuk lebih menertibkan para pedagang untuk membayar retribusi pasarnya tepat waktu. Pengawasan tersebut dilakukan dengan cara penggantian sistem karcis dengan Buku Ketetapan Pembayaran Retribusi (BKPR) untuk memaksimalkan pembayaran. Dinas Pasar Kabupaten Sleman juga me-lakukan pendampingan pe-mungutan dalam memperkuat pengawasan proses pemungutan retribusi pasar.

Indikator meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan dimaksudkan untuk lebih menertibkan administrasi terkait retribusi pasar sehingga me-minimalisir kesalahan administrasi dan kesalahan penyetoran. Strategi yang dilakukan oleh Dinas Pasar Kabupaten Sleman yaitu melalui Pendampingan Administrasi.

Indikator meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang baik merupakan strategi yang dilakukan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi terkait dengan pendapatan atau penerimaan yang diperoleh. Dinas Pasar Kabupaten Sleman akan melakukan perbaikan sarana dan prasarana serta ke-amanan dan kebersihan.

Hambatan atau Kendala

Hambatan-hambatan yang di-hadapi dalam mengoptimalkan pe-nerimaan retribusi pasar, yaitu:

Hambatan yang pertama adalah kurangnya Sumber Daya Manusia yang tersedia. Keterbatasan SDM terkait dengan juru pungut akan sangat menyita waktu dalam proses pemungutan, karena proses pemungutan retribusi pasar harus di-lakukan berkali-kali. Karena keterbatasan SDM tersebut, satu juru pungut yang seharusnya memungut retribusi pasar hanya 1 tempat saja menjadi lebih dari 1 tempat (masih dalam satu pasar) dan

proses pemungutan retribusi pasar harus diselesaikan sebelum jam 12 siang.

Hambatan yang kedua adalah rendahnya kesadaran pedagang. Rendahnya kesadaran pedagang dalam membayar retribusi pasar merupakan salah satu hambatan dalam proses pemungutan retribusi pasar yang sangat sulit untuk dipecahkan, karena hal tersebut terkait dengan pribadi ataupun karakter dari masing-masing pedagang. Rendahnya kesadaran pedagang ini juga tidak semata-mata hanya dikarenakan oleh rendahnya pengetahuan pedagang tentang retribusi pasar, tetapi terlebih karena keadaan. Ada juga pedagang yang tidak tertib membayar retribusi pasar dikarenakan mempunyai lebih dari 3 ijin (lebih dari 1 kios/los), dengan begitu pastilah pedagang akan berat dalam membayar retribusi pasarnya, karena tarif retribusi pasar memang tidak banyak.

Hambatan ketiga adalah terkait dengan tingkat keramaian pasar. Tingkat keramaian pasar menjadi salah satu hambatan dari proses pemungutan retribusi pasar karena hal tersebut akan mempengaruhi pendapatan yang akan diperoleh oleh para pedagang. Jika para pedagang sedang ramai pembeli yang otomatis berdampak pada pendapatannya, maka para pedagang pun mau membayar

retribusi pasar dengan tertib, namun sebaliknya jika sepi pembeli maka pedagang pun enggan untuk membayar retribusi pasar.

Peranan Retribusi Pasar

Peranan retribusi pasar dapat dilihat dari kontribusinya terhadap retribusi daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut Litbang Depdagri (1991) dalam Mohtar Magiwibowo sebagaimana dikutip oleh Yanendra (2009), kriteria untuk mengetahui seberapa besar tingkat kontribusi dari retribusi pasar adalah sebagai berikut:

Tabel 01. Kriteria Kontribusi

Tabel Kriteria Kontribusi	
Kontribusi	Kriteria
<10%	Sangat Kurang
10,1% - 20%	Kurang
20,1% - 30%	Sedang
30,1% - 40%	Cukup
40,1% - 50%	Baik
>50%	Sangat Baik

Kontribusi Retribusi Pasar terhadap Retribusi Daerah

Kontribusi retribusi pasar terhadap retribusi daerah dapat dilihat dengan membandingkan antara realisasi penerimaan retribusi pasar dengan realisasi penerimaan retribusi daerah selama 5 tahun anggaran yaitu 2008 sampai 2012.

Tabel 02. Kontribusi Retribusi Pasar terhadap Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2008 s/d 2012

No.	Tahun Anggaran	Retribusi Pasar (Rp)	Retribusi Daerah (Rp)	Presentase (%)
1	2008	2.850.023.050	52.065.472.060	5,47
2	2009	2.988.086.050	54.719.438.556	5,46
3	2010	3.272.564.550	59.110.503.292	5,54
4	2011	3.560.982.850	33.161.664.470	10,74
5	2012	4.128.739.590	34.019.590.087	12,14
Rata-rata				7,87

(Sumber: Dinas Pasar Kabupaten Sleman dan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman)

Dari tabel 02 dapat dilihat bahwa kontribusi retribusi pasar terhadap retribusi daerah dari tahun ke tahun selalu mengalami kenaikan. Meskipun selalu mengalami kenaikan, kontribusi retribusi pasar terhadap retribusi daerah dapat dikatakan sangat kurang. Hal tersebut dapat dilihat bahwa kontribusinya selama 3 tahun berturut-turut <10% yaitu pada tahun 2008 kontribusinya hanya sebesar 5,47%, tahun 2009 sebesar 5,46 %, tahun 2010 sebesar 5,54%. Pada tahun 2011 mampu me-

ningkatkan kontribusinya sebesar 10,74%, dan pada tahun 2012 sebesar 12,14%, walaupun peningkatan tersebut masih dikatakan kurang berkontribusi.

Kontribusi Retribusi Pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kontribusi retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dilihat dengan membandingkan antara realisasi penerimaan retribusi pasar dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama 5 tahun anggaran yaitu tahun 2008 sampai 2012.

Tabel 03. Kontribusi Retribusi Pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2008 s/d 2012

No.	Tahun Anggaran	Retribusi Pasar (Rp)	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Presentase (%)
1	2008	2.850.023.050	138.745.677.613	2,05
2	2009	2.988.086.050	157.604.530.383	1,90
3	2010	3.272.564.550	163.442.921.920	2,00
4	2011	3.560.982.850	227.108.171.114	1,57
5	2012	4.128.739.590	297.202.705.217	1,39
Rata-rata				1,78

(Sumber: Dinas Pasar Kabupaten Sleman dan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman)

Dari tabel 03 dapat diketahui bahwa kontribusi retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Sleman yaitu hanya mampu memberikan sumbangan rata-rata sebesar 1,78% setiap tahunnya. Hal tersebut memberikan informasi bahwa strategi yang dilakukan Dinas Pasar Kabupaten Sleman harus lebih ditingkatkan lagi agar kontribusi retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah masih terbilang sangat kurang. Dengan lebih mengoptimalkan strategi yang dilakukan diharapkan penerimaan retribusi pasar akan selalu mengalami kenaikan sehingga mampu meningkatkan persentase dalam memberikan sumbangan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk memperlancar pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

SIMPULAN

Berdasarkan analisa data dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa strategi optimalisasi penerimaan

retribusi pasar yang dilakukan oleh Dinas Pasar Kabupaten Sleman dengan melaksanakan lima indikator sudah baik. Diantara lima indikator tersebut, strategi dalam meningkatkan pengawasan dengan menggunakan Buku Ketetapan dan Pembayaran Retribusi (BKPR) adalah salah satu strategi yang dirasa paling efektif dalam mengoptimalkan penerimaan retribusi pasar. Didukung dengan strategi lain seperti sosialisasi terhadap pedagang dan bimbingan teknik bagi juru pungut dapat lebih mengoptimalkan penerimaan retribusi pasar di Dinas Pasar Kabupaten Sleman.

Hambatan yang dihadapi dalam mengoptimalkan penerimaan retribusi pasar yaitu kurangnya SDM yang tersedia (juru pungut), rendahnya kesadaran pedagang dalam membayar retribusi pasar serta tingkat keramaian pasar yang selalu dikait-kaitkan oleh pedagang untuk beralasan agar tidak membayar retribusi pasarnya.

Peranan retribusi pasar di Dinas Pasar Kabupaten Sleman dapat dilihat dari kontribusinya terhadap retribusi daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan melihat pada tabel kriteria kontribusi menurut Litbang Depdagri (1991) dalam

Mohtar Magiwibowo, kontribusi retribusi pasar terhadap retribusi daerah dan Pendapatan Asli Daerah dikatakan masih sangat kurang yaitu <10%.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada pembimbing I dan II yang telah dengan sabar memberikan bimbingan, arahan dalam penyusunan jurnal ini.

Terima kasih kepada Prodi Pendidikan Ekonomi dan khususnya BKK Pendidikan Akuntansi.

Terimakasih kepada segenap TIM redaksi Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE) FKIP UNS.

DAFTAR PUSTAKA

Gibson, Ivanevich & Donnely. 1994. *Organisasi dan Manajemen*. Jakarta: Erlangga

Kumilausari, Sinta Tri. *Strategi Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta Dalam Mengoptimalkan Penerimaan Retribusi Pasar Tahun 2008 Melalui Pemberdayaan Pasar Tradisional*. Skripsi. Universitas Sebelas Maret

Moleong, Lexy J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya

Prakosa, Kesit B. 2003. *Pajak dan Retribusi Pasar*. Yogyakarta: UII Press

Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta

Sutedi, Adrian. 2008. *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah*. Bogor Selatan: Ghalia Indonesia

Sutopo, H.B. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: UNS.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Yanendra. 2009. *Analisis Potensi Retribusi Pasar Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta*. Jurnal Akuntansi. UPN Yogyakarta